

**BAB II**

**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**2.1 Capaian Kinerja Makro**

**2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Dari sisi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia, Provinsi Sulawesi Barat sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Pada Tahun 2022 capaian IPM Sulawesi Barat 66,92 kondisi ini meningkat menjadi 69,80 pada Tahun 2023 sehingga indeks pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Barat berada pada level menengah dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Kabupaten dengan indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2023 adalah Kabupaten Mamuju dengan IPM sebesar 72,44 disusul Kabupaten Mamuju yang mencapai 71,07. Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah adalah Kabupaten Mamuju Tengah dengan IPM sebesar 67,63

**TABEL 2.1**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT KABUPATEN**

**DI SULAWESI BARAT TAHUN 2022-2023**

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (%)		
	2022	2023	Laju Kinerja (%)
Kabupaten Majene	67,84	72,44	6,78
Kabupaten Polewali Mandar	64,79	69,24	7,14
Kabupaten Mamasa	67,21	68,14	1.38
Kabupaten Mamuju	68,88	71,07	3.17
Kabupaten Pasangkayu	68,61	70,42	2,63
Kabupaten Mamuju Tengah	66.89	67,63	1,10
Sulawesi Barat	<b>66,92</b>	<b>69,80</b>	<b>4,30</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023*

Upaya peningkatan kualitas kesejahteraan manusia di Provinsi Sulawesi Barat perlahan mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan, hal ini diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dimana pada tahun 2022 IPM sulawesi barat sebesar 66,92 meningkat sebesar 69,80 di tahun 2023.

IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 tumbuh sebesar 4,30 persen sementara IPM nasional tumbuh 4,03 persen, hal tersebut menjadikan pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 berada pada

peringkat ke-dua tertinggi secara nasional. Tingginya pertumbuhan IPM Sulawesi Barat diharapkan dapat terus berlanjut sehingga IPM Sulawesi Barat nantinya dapat meningkat lebih baik lagi serta dapat diharapkan dapat berada pada level tinggi.

### **2.1.2 Angka Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan keterpaduan di dalamnya. Kemajuan pembangunan berkaitan erat dengan pendapatan suatu daerah dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Persyaratan utama terjadinya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan pendapatan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang dalam hal ini adalah ketidak mampuan memenuhi kebutuhan makan yang setara dengan setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan yakni kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat pada tahun 2021 sampai dengan 2022 menunjukkan kenaikan yakni 11,29% di Tahun 2021 menjadi 11,75% di Tahun 2022. Pencapaian itu merupakan hal yang negatif karena masih berada di atas rata-rata nasional yakni 10,70%.

Rata-rata peningkatan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,46 poin persentase per tahun sedangkan nasional sebesar 0,33 point persentase per tahun. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Polewali Mandar sebesar 16,39% dan terendah adalah Kabupaten Pasangkayu sebesar 5,09% pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk miskin pedesaan sebesar 121,83 ribu jiwa atau sekitar 82,93% penduduk berada di daerah pedesaan. Sedangkan penduduk miskin perkotaan 25,07 ribu jiwa atau sekitar 17,06%. Persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat pada tahun 2022 adalah 11,75 persen atau sebesar 159,05 ribu penduduk. Ditinjau dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 meningkat menjadi 66,92. Capaian IPM ini tergolong dalam kategori IPM sedang.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Kemiskinan pada 2023 sebesar 11,75 persen (159,05 ribu orang), naik 0,46 point namun secara absolut bertambah delapan ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi 2022

yang mencapai 11,29 persen (151,87 ribu orang) disebabkan adanya pandemi Covid-19 dan Gempa Bumi di Tahun 2021.

Prespektif kemiskinan tidak hanya mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun menyangkut tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, agar permasalahan kemiskinan secara holistik dapat diketahui Tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan mengalami peningkatan pada September 2020 Terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan (P1) September 2022 sebesar 1,95 atau meningkat 0,51 poin dibandingkan September 2021, tetapi menurun sedikit 0,12 poin dibandingkan September 2020. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) September 2022 sebesar 0,55 atau meningkat 0,26 poin dibandingkan September 2021 tetapi menurun 0,06 poin dibandingkan September 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa pada Maret 2022 dengan meningkatnya angka P1 berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi GK, dan juga dengan meningkatnya angka P2 berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin besar.

Strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya menekankan pada pengurangan penduduk miskin, akan tetapi juga bagaimana memperkecil kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat miskin itu sendiri Untuk mengukur tingkat penduduk miskin maka menggunakan ukuran Garis Kemiskinan dimana merupakan ukuran penentu yang dipergunakan dalam menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Berdasarkan hal tersebut maka penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan Nilai garis Kemiskinan (GK) September 2022 sebesar Rp.350.743,- per kapita per bulan atau meningkat sebesar 6,89 persen dibandingkan September 2021 yaitu sebesar Rp. 328.144. Untuk itu disajikan tabel garis kemiskinan dan perubahannya menurut pengeluaran antara bulan September 2022 sampai bulan September 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat**  
**September 2022 – September 2023**

Kabupaten	Angka Kemiskinan %		
	2022	2023	Laju Kinerja (%)
Kabupaten Majene	15,13	14,54	-3,9
Kabupaten Polewali Mandar	16,39	16,08	-1,89
Kabupaten Mamasa	14,51	14,31	-1,37
Kabupaten Mamuju	7,63	7,57	-0,78
Kabupaten Pasangkayu	5,09	4,79	-5,89
Kabupaten Mamuju Tengah	7,17	7,32	2,09
Sulawesi Barat	11,75	11,49	-2,21

**Tabel 2.3**  
**Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut jenis pengeluaran,**  
**September 2022 – September 2023**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
September 2021	266 109	74 540	340.649
Maret 2021	277 068	77 925	354.993
September 2022	278 234	78 733	356.967
Perdesaan			
September 2021	262 158	77 679	339.837
Maret 2022	268 940	80 755	349.695
September 2022	270 167	82 102	352.269
Perkotaan + Perdesaan			
September 2022	262 966	76 976	339.942
Maret 2023	270 655	80 088	350.743
September 2023	271 458	81 416	352.874

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

Terdapat 4 (empat) komoditi makanan yang memberi kontribusi terbesar Garis Kemiskinan pada September 2022 yaitu makanan dan minuman jadi, padi-padian, rokok, dan ikan/udang/cumi/kerang, Sementara itu, perumahan, aneka komoditas dan jasa, komoditas tahan lama, dan pajak, pungutan dan asuransi merupakan 4 (empat) komoditi bukan makanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Garis Kemiskinan.

### 2.1.3 Angka Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) menunjukkan angka yang menggembirakan hal ini disebabkan karena angka tersebut konsisten berada di bawah nasional dimana angka pada Agustus 2021 TPT Sulawesi Barat sebesar 3,13 persen terjadi kenaikan sebesar 0,34 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,98 persen dibandingkan nasional sebesar 7,07 persen jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 696,12 ribu orang, naik 15,35 ribu orang dibanding Agustus 2020 Senada dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sebesar 0,30 persen pain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 3,13 persen atau sebanyak 23,13 ribu orang yang berarti meningkat 2,85 ribu orang atau 0,34 persen pain dibandingkan Agustus 2020 Penduduk yang bekerja sebanyak 672,99 ribu

orang, bertambah 12,51 ribu orang dari Agustus 2020 Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Pertanian (3,37 persen poin) dan Jasa Kesehatan (0,17 persen poin) Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Industri (0,93 persen poin) dan Perdagangan (0,76 persen poin) Sebanyak 488,78 ribu orang (72,63 persen) bekerja di kegiatan informal, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 184,20 ribu orang (27,37 persen) Penduduk yang bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,72 poin persen dibandingkan Agustus 2020

Terdapat 120,52 ribu orang atau mencapai 12,15 persen dari penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 18,43 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yang tercatat sebanyak 10,53 persen.

**Tabel 2.2**  
**Persentase Angka Pengangguran Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat**  
**September 2022 – September 2023**

Kabupaten	Angka Pengguran %		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Laju Kinerja (%)
Kabupaten Majene	2,85	2,64	-7,36
Kabupaten Polewali Mandar	3,38	1,95	-42,30
Kabupaten Mamasa	2,18	2,35	7,79
Kabupaten Mamuju	3,79	2,99	-21,10
Kabupaten Pasangkayu	3,13	2,02	-35,46
Kabupaten Mamuju Tengah	2,52	1,83	-27,38
Sulawesi Barat	<b>3,13</b>	<b>2,27</b>	<b>-27,47</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi cenderung menurun, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,39 persen namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 5,66 persen yang masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,02 persen. Masih tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tersebut dari angka rata-rata nasional disebabkan oleh konsistensi pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di daerah serta semakin pesatnya kinerja ekonomi di berbagai bidang seperti perkebunan, pertanian, pertambangan jasa industri dan lainnya.

Ekonomi Sulawesi Barat tahun 2023 kontraksi 2,42 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 13,31 persen. Dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam terjadi pada komponen Impor yakni sebesar

14,91 persen. Ekonomi Sulawesi Barat triwulan IV-20201 secara y-on-y mengalami kontraksi sebesar 7,51 persen. Ekonomi Sulawesi Barat triwulan IV-2021 secara q-to-q mengalami pertumbuhan sebesar 1,69 persen.

**Tabel 2.3**  
**Persentase Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten**  
**di Sulawesi Barat September 2022 – September 2023**

Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi		
	2022	2023	Perubahan %
Kabupaten Majene	2,39	5,28	120,921
Kabupaten Polewali Mandar	3,58	4,58	27,933
Kabupaten Mamasa	1,79	2,72	51.955
Kabupaten Mamuju	3,24	4,37	34,877
Kabupaten Pasangkayu	-0,08	6,78	85,75
Kabupaten Mamuju Tengah	2,30	2,80	21,739
Sulawesi Barat	2,31	5,25	127,273

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

Pada tahun 2023 hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,85 persen Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,76 persen dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,73 persen. Sementara Lapangan usaha Jasa Konstruksi mengalami kontraksi dalam pertumbuhannya sampai -13,31 persen.

**2.1.5 Pendapatan Perkapita**

Pendapatan perkapita Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya untuk tahun 2024 sebesar 33,59 juta namun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 59,06 juta angka tersebut di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2022 yang sebesar 40,54 juta rupiah. Dan untuk tahun 2023 turun menjadi 33,31 juta rupiah.

**Tabel 2.3**  
**Persentase Pendapatan Perkapita Menurut Kabupaten**  
**di Sulawesi Barat September 2022 – September 2023**

Kabupaten	Pendapatan Perkapita (%)
-----------	--------------------------

	2022	2023	Ket.
Kabupaten Majene	859.413,08	920.030,00	7,053
Kabupaten Polewali Mandar	883.870,41	1.004.050,00	13,597
Kabupaten Mamasa	689.870,33	807.382,00	17,034
Kabupaten Mamuju	993.881,18	1.094.076,00	10,081
Kabupaten Pasangkayu	1.269.032,08	1.254.062,00	-1,18
Kabupaten Mamuju Tengah	1.126.013,18	1.138.424,00	1,102
Sulawesi Barat	955.905,00	1.036.520,00	8,433

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

### 2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka indeks rati gini. Ratio gini sulawesi Barat Tahun 2022 sebesar 0,36% mengalami kenaikan pada Tahun 2023 yakni 0,37%. Namun masih berada jauh dari rata-rata nasional yakni 0,39% hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan dari Tahun 2023 namun pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat masih tergolong rendah. Ketimpangan terbesar berada di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 0,41 bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sedangkan ketimpangan yang terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar yakni 0,30.

**Tabel 2.3**  
**Persentase Rati Gini Menurut Kabupaten**  
**di Sulawesi Barat September 2022 – September 2023**

Kabupaten	Ketimpangan Pendapatan (gini Ratio) %		
	2022	2023	Perubahan (%)
Kabupaten Majene	0,377	0,340	-9,81
Kabupaten Polewali Mandar	0,329	0,330	0,30
Kabupaten Mamasa	0,325	0,380	16,92
Kabupaten Mamuju	0,388	0,372	-4,12
Kabupaten Pasangkayu	0,320	0,292	-8,75
Kabupaten Mamuju Tengah	0,354	0,344	-2,82
Sulawesi Barat	<b>0,362</b>	<b>0,351</b>	-3,03

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

### 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 diukur dengan indikator kinerja suatu keluaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa kinerja tersebut diukur dengan indikator yang telah tercantum di dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah. Ketercapaian indikator menjadi parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dari hasil capaian kinerja tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023, Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah yang sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1 tentang Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat dan Tabel 7.2 tentang Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

**a. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan Capaian 2022	Target Capaian 2023	Kondisi Akhir 2026
1	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah/Kapita/ Tahun	35,04	39,28	42,65	54,61
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,56	(2,5 - 3,5)	4,5	6,7
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,85	11,23	10,72	9,06
4	Indeks Gini Rasio	Poin	0,366	0,355	0,350	0,325
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,13	3,05	2,98	1,95
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,36	67,06	68,16	71,56
7	Indeks Pendidikan	Poin	0,6226	0,6331	0,6495	0,6986
8	Indeks Kesehatan	Poin	0,6962	0,7067	0,7231	0,7722
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,72	76,32	77,45	80,50
10	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	33,7	34	34,3	35,2
11	Indeks Risiko Bencana	Poin / Kategori	164,85 / Tinggi	163 / Tinggi	161 / Tinggi	144 / Sedang
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin / Kategori	60,04 / B (2020)	62,86 / B	66,86 / B	80,16 / A
13	Nilai AKIP	Poin / Kategori	63,14 / B (2020)	66,29 / B	70,29 / BB	80,54 / A
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	73,302	74,035	74,776	77,042
15	Indeks SPBE	Poin	2,04	2,20	2,35	3,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	0	100	100	100



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan Capaian 2022	Target Capaian 2023	Kondisi Akhir 2026
	terhadap Pelayanan Publik					

7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja perangkat daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Tabel 7.2  
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci		Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target 2023	Kondisi Akhir 2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
1	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,86	13,00	13,21	13,87
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,96	8,04	8,18	8,58
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Persen	69,31	72,78	100	100
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Persen	78,72	82,66	100	100
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
		Angka Harapan Hidup	Tahun	65,25	65,65	66,06	67,25
		Prevalensi Stunting	Persen	33,80	30	26,7	20
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persen	50	100	100	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB Provinsi	Persen	50	100	100	100
		Nilai Akreditasi RSUD Provinsi	Nilai	Utama	Utama	Utama	Paripurna
		Nilai Kelas RSUD Provinsi	Nilai	C	C	C	B
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	Persen	1,08	1,08	1,4	1,8
1	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
		Persentase Pemenuhan SPM terkait Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	0	100	100	100
		Persentase Pemenuhan SPM terkait	Persen	0	100	100	100

No.	Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target 2023	Kondisi Akhir 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					
	Rasio Kemantapan Jalan	Persen	42,18	45,19	48,19	56,19
1	04	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				
	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	57,26	59,12	61,03	67,16
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	0	100	100	100
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	37,5	100	100	100
1	05	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
	Persentase Penyediaan Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Provinsi	Persen	0	100	100	100
	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	100
	Persentase Penurunan Skor Risiko Bencana	Poin	0,985	1,122	1,227	5,882
	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	Persen	50	70	100	100
	Tingkat Ketersediaan Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Provinsi	Persen	0	0	80	100
	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	70	70	80	100
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	70	100	100	100
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	70	80	80	100
1	06	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>				
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	86,67	100	100	100
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	78,13	100	100	100
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	75	100	100	100
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	78,57	100	100	100
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Provinsi	Persen	100	100	100	100
	Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kewajiban Provinsi	Persen	46,90	60	60	60
	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	28,66	11,75	17,62	29,37
2	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>					
2	07	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>				

No.	Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target 2023	Kondisi Akhir 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Poin	51	51,5	52	53,5
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	4,79	5,60	5,73	6,37
	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Persen	41,35	42	45	50
2	08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	65,92	66,2	66,5	70,2
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,43	90,25	91,5	95
	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap Belanja Daerah	Persen	3,5	5,2	7	12,25
2	09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
	Persentase Cadangan Pangan Provinsi	Persen	3,72	1,22	20	30
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	35,3	38	45	60
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	74,6	78,5	82,4	94,1
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	74,6	78,5	82,4	94,1
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
	Persentase Luasan Lahan Bersertifikat	Persen	19,72	20,21	20,72	22,31
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
	Indeks Kualitas Udara	Poin	90,97	89,7	91	91,5
	Indeks Kualitas Air	Poin	56,04	55	56,05	56,3
	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	81,52	82,92	83,62	83,65
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	47,83	57,57	66,26	100
	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	0,174	0,174	0,348	1,391
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,82	1,79	1,76	1,67
	Total Fertility Rate/TFR per-WUS Usia 15-49 Tahun	Persen	2,69	2,65	2,6	2,48
	Age Specific Fertility Rate/ASFR (Jumlah Kelahiran per-1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun)	Persen	37,3	37	32	20
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				

No.	Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target 2023	Kondisi Akhir 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	70,95	71,19	73,10	76,43
2	16	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>				
	Tingkat Kematangan SPBE	Persen	40,8	44	47	60
	Presentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa	Persen	69,04	69,39	78,09	100
2	17	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	50	60	76	90
	Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Persen	20	20	25	40
2	18	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>				
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	-19,11	5	10	15
	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rp	300	390	410	470
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Persen	87,00 (Baik)	89,00 (Sangat Baik)	89,00 (Sangat Baik)	92,00 (Sangat Baik)
2	19	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>				
	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	47,33 (2020)	53,67	54	55,83
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	0,32	0,34	0,40	0,5
	Tingkat Prestasi Olahraga	Persen	3,33	6,66	13,33	23,33
2	20	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>				
	Tingkat Pengelolaan Data Sektoral	Persen	95,12	100	100	100
2	21	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>				
	<i>Cyber Security Maturity</i>	Poin	2,51 (2020)	2,573	2,637	2,840
2	22	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>				
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	48,86	49,08	49,31	49,99
2	23	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>				
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	16	17	17,64	20
	Tingkat Kunjungan Masyarakat di Perpustakaan	Persen	20,22	40	60	100
2	24	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>				
	Indeks Pengawasan Kearsipan	Poin	53,49	60	65	80
	Tingkat Pengelolaan Kearsipan	Persen	20	50	60	100
3		<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>				
3	25	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>				
	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	105,78	107,36	107,5	108,3

No.	Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target 2023	Kondisi Akhir 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	11,08	11,35	11,62	12,44
	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Tahun	60,45	63	66,5	72,5
	Persentase Luas Wilayah Kawasan Konservasi Perairan	Persen	0	0	0,027	0,038
3	26	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>				
	Persentase Peningkatan Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,23	0,24	0,25	0,28
	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	11	11,5	12	12
	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	36	40	45	47
	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Legalitas Usaha	Persen	0	25	35	45
3	27	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>				
	Nilai Tukar Petani Sektor Pertanian	Nilai	123,32	127,78	132,41	147,32
	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	23,14	23,34	23,55	24,16
	Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	Ton/Ha/Tahun	5,2	5,35	5,5	5,99
	Produktivitas Tanaman Pangan (Jagung)	Ton/Ha/Tahun	5,18	5,35	5,53	6,09
	Produktivitas Tanaman Pangan (Kedelai)	Ton/Ha/Tahun	1,65	1,7	1,75	1,91
	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB	Persen	20,51	20,95	21,4	22,8
3	28	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan</b>				
	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	0,32	0,32	0,33	0,35
	Persentase Peningkatan PNPB Sektor Kehutanan	Persen	26	-8	15	30
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	72,66	72,8	72,85	73
3	29	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				
	Rasio Elektrifikasi	Persen	97,83	97,96	98,1	100
	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Persen	93,85	94,62	96,15	100
3	30	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>				
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,93	10,04	10,15	10,5
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	20,79	24,4	27,85	32,35
	Persentase Stabilitas dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Persen	13,47	15,2	16	19,5
3	31	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>				
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	10,72	10,92	11,13	11,78
	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan	Persen	5,89	6,11	6,34	7,08
3	32	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>				
	Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri	Persen	33,33	50	66,67	100
4		<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				
4	01	<b>Sekretariat Daerah</b>				

No.	Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target 2023	Kondisi Akhir 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tingkat Reformasi Hukum	Persen	N/A	60	70	100
	Tingkat Kualitas Kebijakan	Persen	N/A	60	70	100
	Indeks Kelembagaan	Poin	N/A	60	70	100
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	69,51	70,90	73,03	84,53
	Tingkat Kepuasan Layanan	Persen	N/A	100	100	100
4	02	<b>Sekretariat DPRD</b>				
	Tingkat Kepuasan Layanan terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	87,56	100	100	100
5		<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
5	01	<b>Perencanaan</b>				
	Tingkat Dukungan Pencapaian Nilai AKIP Provinsi	Persen	82,7 (2020)	83	83,25	84
	Tingkat Konsistensi Program Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD	Persen	99,99	100	100	100
5	02	<b>Keuangan</b>				
	Opini BPK terhadap LKPD	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP
	Rasio Pendapatan Asli Daerah	Persen	0,202	0,220	0,226	0,249
5	03	<b>Kepegawaian</b>				
	Nilai Dimensi Kualifikasi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	14,17	15	17	22
	Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	14,86	16	17	22
	Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	5	5	5	5
5	04	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>				
	Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	7,43	10	10	13
5	05	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				
	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100	100
5	07	<b>Penghubung</b>				
	Tingkat Layanan Penghubung	Persen	100	100	100	100
6		<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>				
6	01	<b>Inspektorat Daerah</b>				
	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3
8		<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>				
8	01	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				
	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	73,09 (2020)	73,19	73,29	73,99

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar serta fungsi penunjang yang tersaji dalam indicator kinerja kunci sebagai berikut :

- 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (terlampir)
- 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (terlampir)
- 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang (terlampir)

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam mengukur tingkat persentase capaian kinerja menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Rumus 1 : **Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik**, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2 : **Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja**, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan hasil pengukuran kinerja, sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kategori Pencapaian kinerja**

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	>85-100	Memuaskan
2.	>75-85	Sangat Baik
3.	>65-75	Baik
4.	>50-65	Cukup
5.	>30-50	Kurang
6.	0-30	Sangat Kurang

#### 2.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Pengukuran tingkat capaian kinerja



Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dalam rangka memberikan kesimpulan hasil pengukuran kinerja, sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel Kategori pencapaian kinerja**

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	>85-100	Memuaskan
2.	>75-85	Sangat Baik
3.	>65-75	Baik
4.	>50-65	Cukup
5.	>30-50	Kurang
6.	0-30	Sangat Kurang

Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun pertama RPJMD Sulawesi Barat 2023-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 77,89 % yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel Pengukuran Kinerja**

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia					
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
1.1	IPM	70,53	66,92	94,88	Memuaskan
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan Yang Akuntabel dan modern					
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A	B	76 **	Sangat Baik
3.2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP**	100	Memuaskan
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas Infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta pemukiman dan perumahan					
4.1	Kondisi mantap jalan provinsi (%)	67,65	49,50	67,84	Baik
4.2	Rasio Elektrifikasi	96	98,49	102,59	Memuaskan
4.3	Rumah layak Huni (%)	97	54,01	55,68	Kurang
Sasaran 4 : Meningkatnya konektivitas antara wilayah pulau kecil dengan daratan utama dan antara desa dengan kota dalam mengurangi disparitas wilayah					
5.1	Persentase Daerah Tertinggal (%)	30	35,13	82,90	Sangat Baik
Sasaran 5 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas					
6.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,63	2,30	30	Kurang



6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,23	2,34	95,07	Memuaskan
6.3	Angka Kemiskinan (%)	9,06	11,92	68,43	Baik
6.4	Indeks Gini Ratio	0,378	0,371	97,35	Memuaskan
Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing ekonomi local					
7.1	Peringkat Daya Saing Daerah	18	27	50	Kurang
Sasaran 7 : Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup					
8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	102,36	91,88	Memuaskan
Rata Rata				78,89	Sangat Baik

Keterangan :  
 \* : Realisasi merupakan hasil pengolahan sementara  
 \*\* : Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2022

### A. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

1

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2023-2026 yaitu **Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya** dan juga untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Kualitas SDM Yang terdidik, Sehat dan Berbudaya** sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian kinerja sasaran sebesar 94,88 dengan kategori predikat Memuaskan Berikut hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia :

Tabel Pengukuran Kinerja sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia					
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1.1	IPM	70,53	66,92	94,88	Memuaskan

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dan merupakan data strategis yang bisa digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah. capaian IPM Sulawesi Barat tahun 2023 sebesar 66,92 dibandingkan dengan target kinerja 70,53 maka Persentase capaian 94,88%, Persentase capaian periode awal RPJMD 2023-2026 dengan target masing-masing sebagai berikut :

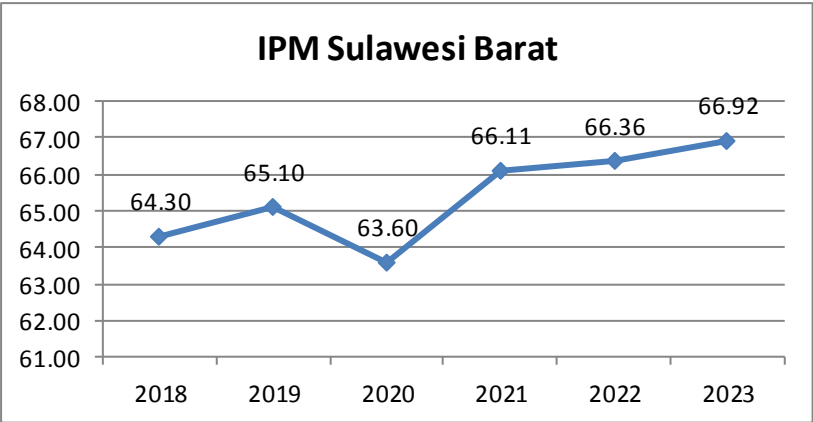
Tabel perbandingan persentase capaian kinerja indikator IPM

IPM Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2019	65,10	65,10	100
2020	65,73	63,60	96,75
2021	68,65	66,11	96,30
2022	69,68	66,36	95,23
2023	70,53	66,92	94,88

kondisi ini meningkat beberapa poin dari capaian tahun 2022 yang sebesar 66,36.

Berikut tren capaian IPM dari tahun 2023-2026 :

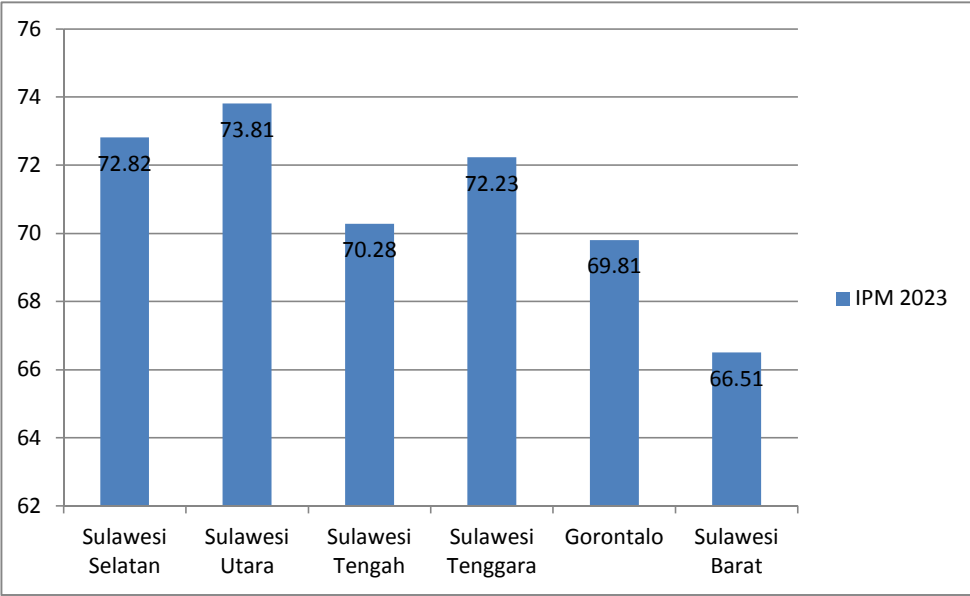
**Grafik Tren Capaian IPM Sulawesi Barat 2017-2022**



Sumber : BPS Sulbar 2023

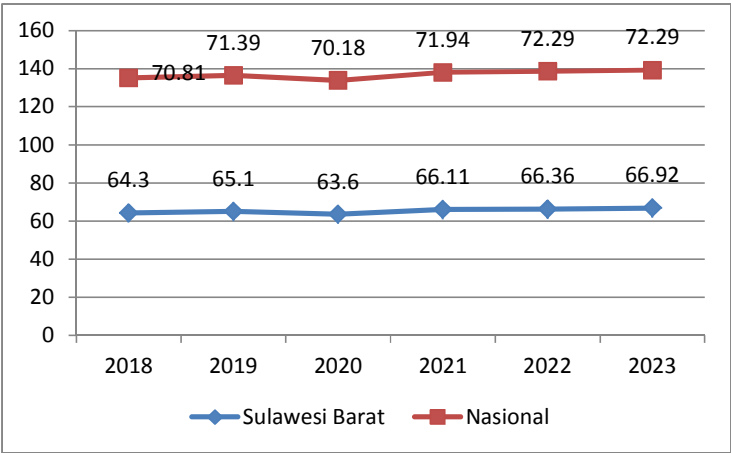
Jika dibandingkan dengan capaian IPM tahun 2022 dari seluruh Provinsi yang ada di Sulawesi maka harus diakui bahwa Capaian IPM Sulawesi Barat masih sangat rendah berada pada urutan paling bawah. berikut grafik perbandingan capaian IPM di Sulawesi :

**Grafik perbandingan capaian IPM Provinsi di Sulawesi Barat**



Dibandingkan dengan capaian Nasional maka Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata capaian nasional yang berada diangka 72,29.

**Grafik 03**  
**Perbandingan capaian IPM Sulawesi Barat dan Nasional**

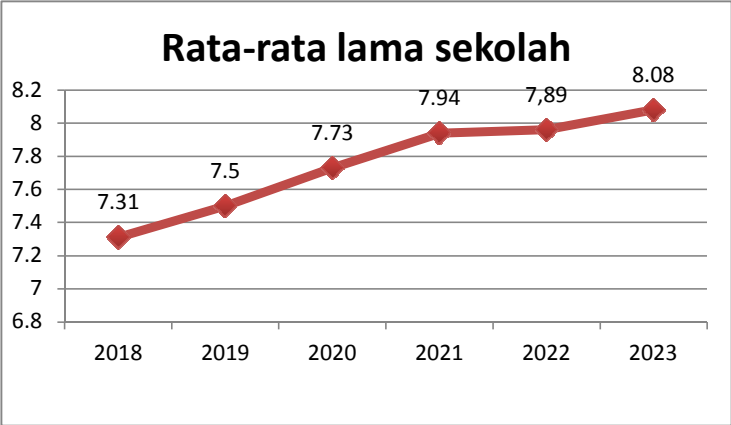


Sumber : Diknas Sulbar 2023

Meningkatnya capaian IPM di Sulawesi Barat disebabkan peningkatan pada seluruh komponen di tahun 2023, Umur harapan hidup saat lahir tumbuh 0,58%, Rata-rata

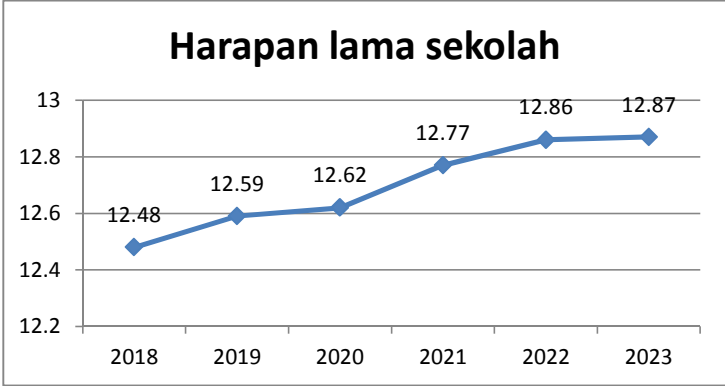
lama sekolah tumbuh 1,51%, Harapan Lama Sekolah tumbuh 0,08% dan Pengeluaran perkapita tumbuh 2,24%. Berikut grafik capaian komponen IPM:

**Grafik Rata-rata lama sekolah  
Di Sulawesi Barat tahun 2018-2023**



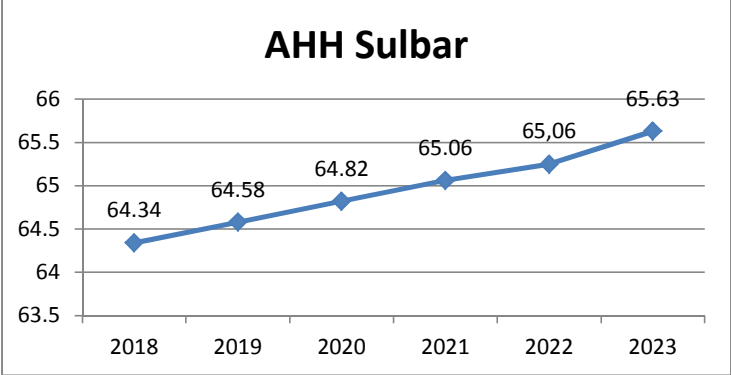
Sumber : BPS Sulbar 2023

**Grafik 05  
Harapan lama sekolah di Sulawesi Barat Tahun 2018-2023**



Sumber : BPS Sulbar 2023

**Grafik Angka Harapan Hidup Sulawesi Barat Tahun 2018-2023**



Sumber : BPS Sulbar 2023

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
1. Penyelarasan seluruh dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan Program kegiatan tepat sesuai dengan outcome sasaran;
  2. Keberhasilan pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat daerah pengampu sasaran strategis pemda;

3. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, GERMAS dilakukan sebagai penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat.
  4. Mengefektifkan peran Posyandu dalam melakukan edukasi pengetahuan gizi termasuk gerakan nasional sadar gizi. Posyandu sendiri merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan. Peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan dapat dilakukan melalui penyuluhan di Posyandu. Kegiatan ini sebenarnya telah diatur pada salah satu meja kader pada setiap kegiatan Posyandu, yaitu pada meja keempat. Namun, praktiknya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.
  5. Pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan di DTPK dengan pelayanan kesehatan bergerak gugus pulau.
  6. Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat.
  7. Terkendalnya penyakit menular dan penyakit tidak menular.
  8. Meningkatnya akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan.
  9. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan menengah dan khusus, sehingga setiap warga masyarakat usia sekolah dan anak-anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) mendapatkan kemudahan dan kesempatan memasuki program pendidikan serta Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan.
- Faktor Penghambat keberhasilan
1. Pelaksanaan Penyelarasan dan peningkatan Kualitas dokumen perencanaan belum maksimal sehingga ada program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah pengampu sasaran strategis Pemda belum sesuai.
  2. Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah masih ada yang tidak sesuai dengan sasaran outcomenya.
  3. Prinsip money follows program dalam penggaran atau anggaran berbasis kinerja belum maksimal dilaksanakan.
  4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang masing-masing.
  5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu mengenai kesehatan reproduksi.
  6. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan masih kurang memadainya fasilitas kesehatan.
  7. Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelolaan program belum semuanya bersinergi.
  8. Perencanaan anggaran dan kegiatan belum berbasis capaian indikator kinerja tahun anggaran.
  9. Keterbatasan anggaran dalam mencapai kinerja.

10. Kesiambungan program antara bidang maupun program yang ada di dinas kabupaten beum optimal.

➤ Strategi Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Berkualitas dengan strategi meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan tenaga pendidikan dan kependidikan.
2. Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat dengan strategi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan kesehatan anak, ibu dan keluarga, pencegahan dan pengendalian penyakit, mempercepat penurunan stunting serta meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada setiap bidang.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan fokus pada penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
5. Melaksanakan penjenjangan kinerja dari level atas sampai pada level staf sehingga outcome sasaran bisa tercapai.
6. Perlu upaya sinkronisasi dan pola operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya antara kabupaten/kota dengan provinsi maupun dengan pusat.
7. Perlunya komitmen dalam kinerja pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat dengan semua stakeholder, lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Sasaran Strategis

2

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya** dan juga untuk mencapai tujuan **Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik** dengan Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, sasaran ini diukur dengan dua indikator kinerja, Berikut hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan Yang Akuntabel dan modern :

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 2

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan Yang Akuntabel dan modern					
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%Capaian	Interpretasi
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A	B	64	Baik

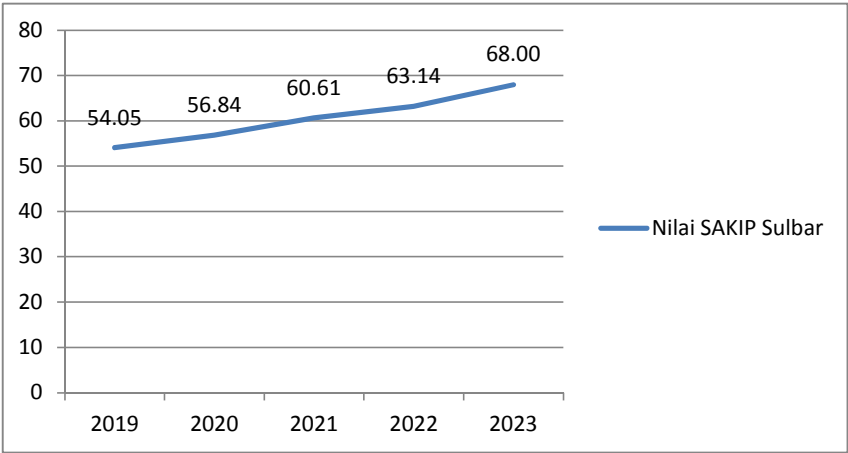
3.2	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP**	100	Memuaskan
-----	--	-----	-------	-----	-----------

### 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

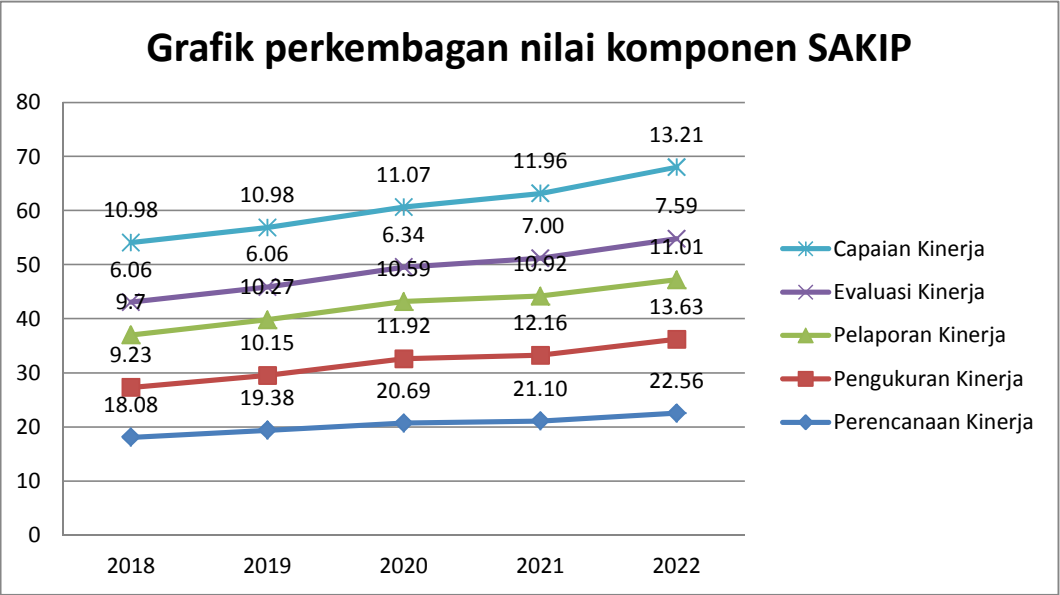
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diambil dari hasil Penilaian Sistem AKIP oleh Kementerian PAN dan RB, sampai dengan laporan ini disusun nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 belum disampaikan. meskipun demikian telah disampaikan secara virtual pada acara Penganugrahan bersama pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi pada Tanggal 6 Desember 2023.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapat predikat B, ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Sulawesi barat menunjukkan hasil yang cukup memadai namun masih memerlukan banyak perbaikan. Adapun untuk menghitung persentase capaian adalah dengan menggunakan nilai SAKIP per nilai maksimal target X 100% atas dasar formula ini maka Persentase capaian Berikut capaian kinerja indikator ini dari tahun 2023:

Trend Capaian Nilai SAKIP 2018-2023



Dari data di atas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang mana pada tahun pertama Periode RPJMD tahun 2018 mendapatkan nilai hasil evaluasi 54,05 dan diakhir masa periode RPJMD meningkat menjadi 68,00. Namun disadari bahwa peningkatan yang dialami tidak begitu signifikan setiap tahunnya sehingga predikat yang didapatkan masih tetap B. adapun Perkembangan nilai dari seluruh komponen SAKIP dapat dilihat pada grafik berikut :



Capaian kinerja dari indikator ini adalah didukung oleh pelaksanaan :

1. Fasilitasi pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang dilakukan oleh Biro Organisasi.
2. Pelaksanaan reviu SAKIP oleh Inspektorat dengan hasil 24 OPD mendapatkan Predikat BB, 16 OPD dengan predikat B dan 1 PD yang Predikat CC.

**2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi**

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat diambil dari hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga laporan ini disusun hasil audit tersebut belum disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun demikian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014 secara berturut-turut hingga tahun 2021 Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah didapatkan dan ini sesuai target kinerja. Salah satu faktor yang menjadi pendukung tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) adalah :

1. Ditindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI sejak terbentuknya



Provinsi Sulawesi Barat diketahui terdapat 557 pokok teuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.324 hasil monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pada OPD terkait dan hasil pemutakhiran data TLHP semester 2 bulan Desember 2022 dengan Tim BPK RI diperoleh hasil, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 921 rekomendasi, ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi sebanyak 58 rekomendasi, ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi sebanyak 280 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 71 rekomendasi sedangkan data yang masih dalam proses verifikasi BPK-RI sebanyak 89 rekomendasi.

2. Tingkat kepatuhan OPD terhadap ketentuan peundang-undangan atas pengelolaan pemerintahan semakin meningkat.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
1. Penyelarasan seluruh dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan Program kegiatan tepat sesuai dengan outcome sasaran;
  2. Keberhasilan pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan pada Organisasi Perangkat daerah pengampu sasaran strategis pemda;
  3. Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah terkait Penyelenggaraan SAKIP secara menyeluruh;
  4. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
  5. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan;
  6. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja dalam hal ini Pengukuran Kinerja;
  7. Sebagai salah satu indikator akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah adalah kualitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang memenuhi prinsip-prinsip wajar, tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
  8. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik
- Faktor Penghambat keberhasilan
1. Pelaksanaan Penyelarasan dan peningkatan Kualitas dokumen perencanaan belum maksimal sehingga ada program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah pengampu sasaran startegis Pemda belum sesuai.
  2. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat daerah masih ada yang tidak sesuai dengan sasaran outcomenya.
  3. Prinsip money follows program dalam penggaran atau anggaran berbasis kinerja belum maksimal dilaksanakan.

4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang masing masing
5. Pohon kinerja belum ditetapkan sebagai alat bantu dalam menganalisa tujuan dan sasaran outcome OPD dan belum sepenuhnya memuat dan menetapkan hal-hal yang hendak dicapai (Outcome) sesuai dengan kewenangannya.
6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menyusun rencana aksi atas kinerja sesuai dengan komitmen yang terdapat dalam dokumen perjanjian.
7. Indikator Kinerja Utama PD masih ada yang tidak sesuai dengan sasaran strategisnya.
8. Pengukuran kinerja belum dilaksanakan secara berkala dan belum ada mekanisme baku yang ditetapkan dalam cara mengumpulkan data pengukuran kinerja.
9. Laporan kinerja belum maksimal dalam memberikan informasi evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
10. Komitmen terhadap pencapaian kinerja atas dokumen – dokumen kinerja yang telah di tetapkan terutama yang berhubungan dengan capaian outcome masih perlu ditingkatkan.
11. Pemotongan anggaran yang dialami oleh hampir seluruh instansi pemerintah menyebabkan investasi instansi pemerintah atas penguatan Implementasi SAKIP menjadi berkurang.
12. Sinergi dengan stakeholder lain yang masih perlu dioptimalkan.

➤ Strategi Pemecahan Masalah

Kebijakan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi kinerja sasaran ini :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada bidang keuangan dan pengelolaan Kinerja;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan fokus pada penyelenggraan Reformasi Birokrasi;
3. Meningkatkan penyelenggaraan SAKIP dan melakukan penjengjangan kinerja yang berkualitas;
4. Pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diharapkan menjadi poin penilaian BPK dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ;
5. Peningkatan penatausahaan aset daerah melalui pengembangan penataan arsip aset daerah dengan aplikasi;
6. Penerapan aplikasi berbasis web based, baik untuk pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah serta pengelolaan kinerja perangkat daerah;
7. Meningkatkan efektifitas peran aparat pengawasan interen pemerintah (APIP) yakni dalam hal ini Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melalui pelaksanaan program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;

8. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah seta memberikan rekomendasi rekomendasi perbaikan jika diperlukan;
9. Penyusunan Kebijakan Tentang SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan SAKIP sehingga tercipta keseragaman.
10. Melaksanakan penjenjangan kinerja dari level atas sampai pada level staf sehingga outcome sasaran bisa tercapai.

Sasaran Strategis

3

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2023-2026 yaitu **Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis** dan juga untuk mencapai tujuan **Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong produktivitas wilayah dan konektivitas antar wilayah** sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja. Capaian kinerja sasaran sebesar **75,17** dengan kategori predikat **Sangat Baik** Berikut hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas Infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta pemukiman dan perumahan :

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 3

Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas Infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta pemukiman dan perumahan					
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
4.1	Kondisi mantap jalan provinsi (%)	67,65	45,90	67,84	Baik
4.2	Rasio Elektrifikasi	96	98,49	102,59	Memuaskan
4.3	Rumah layak Huni (%)	97	54,01	55,68	Kurang
Rata – rata				75,17	Sangat Baik

1. Kondisi Mantap Jalan Provinsi

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian, pembangunan Infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu program utama yang menjadi prioritas dalam RPJMD 2017–2022 karena dari infrastruktur jalan yang baik maka distribusi lalu lintas barang dan manusia bisa lancar. Semenjak Provinsi Sulawesi Barat terbentuk pada tahun 2004, pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah salah satunya adalah pembangunan dalam upaya memperbaiki dan menambah fasilitas jalan.

Berdasarkan SK Jalan tahun 2015 Panjang keseluruhan jalan provinsi (strategis provinsi dan jalan provinsi) 349,670 Km dengan rincian untuk tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Ruas Jalan	Panjang tiap kondisi (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Salubatu – Bonehau	9,199	0,451	19,050	0,000
2	Bonehau – Kalumpang	3,400	13,524	5,046	0,000
3	Kalumpang – Batuisi	8,130	0,000	4,920	2,690
4	Batuisi Bts. Luwu Utara	0,000	0,000	2,000	40,300
5	Jl. Martadinata – Sumarengas – Bts. Tapalang Barat	27,636	0,000	25,143	2,221
6	Batuisi – Bts. Toraja	0,000	1,400	7,000	36,240
7	Lampa Mapili – Matangnga	44,447	0,200	0,833	0,200
8	Matangnga – Keppe	11,522	7,843	10,460	1,275
9	Salutambung – Urekang	12,792	6,928	7,150	9,591
10	Urekang – Mambi	1,380	2,200	12,200	2,800
11	Tikke – Bts. Sulteng	8,682	0,768	0,050	0,000
	<b>Total</b>	<b>127,188</b>	<b>33,314</b>	<b>93,852</b>	<b>95,317</b>

Dari tabel diatas maka indikator ini dihitung dari jumlah panjang keseluruhan jalan dalam kondisi baik dan sedang dengan total 160,501 per jumlah keseluruhan panjang jalan (349,670) dengan demikian didapatkan realisasi dari indikator 45,90%. Reaisasi ini dibandingkan dengan target 2022 yang sebesar 67,65 maka Capaian kinerja sebesar 73,76%, berikut disajikan data perbandingan capaian kinerja per target periode RPJMD 2017-2022:

**Tabel perbandingan persentase capaian kinerja indikator**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2018	34,04	34,04	100
2019	37,24	37,24	100
2020	47,65	39,584	83,06
2021	57,65	42,184	73,16
2022	67,65	45,901	67,84

berikut capaian realisasi indikator periode RPJMD 2017-2022 :

**Persentase Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2018-2022**



1. Perlunya Sumber Pendanaan lain untuk pembangunan jalan provinsi (DAK, APBN melalui penanganan Jalan Daerah, Pinjaman PT. SMI)
2. Telah dilakukan perubahan SK Jalan Provinsi Baru Nomor : 188.4/278/SULBAR/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022, tidak akan terjadi lagi penanganan yang bukan kewenangan provinsi.
3. Peningkatan Kompetensi, Penerapan Aplikasi SIPEMIMPIN dan Update Data Base Jalan sesuai SK Jalan Provinsi baru.
4. Melakukan cascading kinerja sebagaimana yang diatur dalam Permenpan nomor 88 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja.

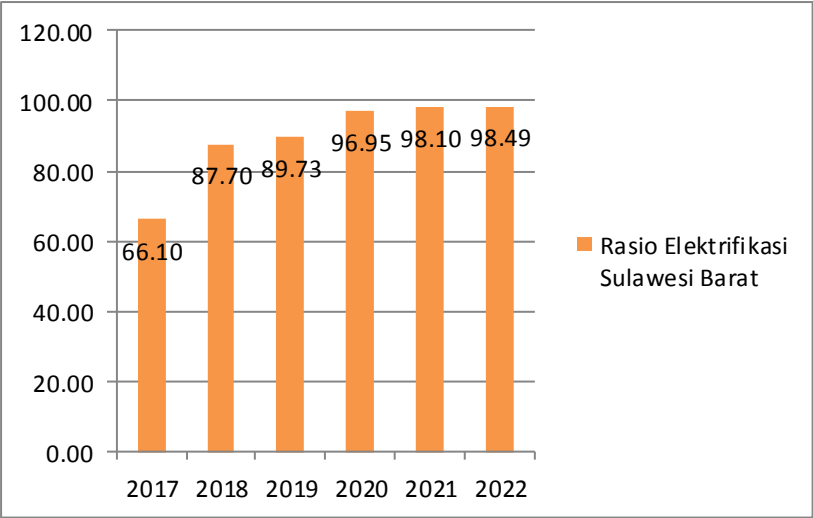
## 2. Rasio Elektrifikasi

Pencapaian pembangunan terkait dengan energi, terlihat dari pencapaian indikator Rasio Elektrifikasi, Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bahwa sampai dengan tahun 2022 realisasi kinerja indikator rasio elektrifikasi di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 98,49 .dibandingkan dengan target kinerja 96 maka persentase capaian 102,59, berikut disajikan data perbandingan capaian kinerja per target periode RPJMD 2017-2022 :Tabel perbandingan persentase capaian kinerja indikator

RE Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2018	83,88	87,70	104,55
2019	90	89,73	99,7
2020	92	96,95	105,38
2021	94	98,10	104,36
2022	96	98,49	102,59

berikut tren perkembangan realisasi kinerja indikator ini :

Grafik Perkembangan Capaian Indikator Rasio Elektrifikasi 2017- 2021



Sumber : Dinas ESDM 2023

Capaian indikator ini meskipun sudah mencapai 98% tapi saat ini masih ada 2 (dua) Kabupaten di Sulawesi Barat yang belum maksimal teraliri listrik yaitu di Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju Utara. Berikut beberapa data pendukung sasaran ini :

Tabel Capaian Rasio Elektrifikasi Kabupaten 2017-2022

KAB	RASIO ELEKTRIFIKASI (RE)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pasangkayu	44,00	61,00	92,72	96,45	98,05	98,56
Mateng	44,00	60,26	89,36	93,58	96,90	97,67
Mamuju	72,90	95,80	87,18	96,99	98,37	98,84
Majene	84,60	85,42	83,92	94,37	96,17	98,06
Mamasa	52,95	63,95	86,77	94,86	95,96	96,62
Polman	84,40	95,93	93,29	99,61	99,71	99,84

Tabel Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Tahun 2021 dengan Tahun 2022

KAB	PELANGGAN PLN (RT) 2021	NON PLN (RT) 2021	RUMAH TANGGA BELUM BERLISTRIK 2021	JUMLAH RUMAH TANGGA 2021	UPDATE RT TW IV 2022	PELANGGAN PLN (RT) 2022	NON PLN (RT) 2022	JUMLAH HRT BERLISTRIK 2022	JUMLAH RUMAH TANGGA 2022	RUMAH TANGGA BELUM BERLISTRIK 2022	RE PLN 2022	RE NON PLN 2022	RE LTSH E 2022
Pasangkayu	31.207	1.946	660	33.813	815	32.165	1.963	-	34.628	500	92.89	5,67	-
Mateng	30.168	444	978	31.590	806	31.201	440	-	32.396	755	96,31	1,36	-
Mamuju	57.234	6.691	1.060	64.985	3.499	61.000	5.869	803	68.484	823	89,07	8,57	1,17
Majene	32.258	1.967	1.363	35.588	3.060	35.926	1.971	-	38.648	751	92,96	5,10	-
Mamasa	22.154	17.966	1.691	41.811	1.453	23.826	17.976	510	43.264	952	55,07	40,35	1,17
Polman	106.400	5.981	329	112.710	4.931	111.564	5.892	-	117.641	185	94,83	5,01	-
JUMLAH	279.421	34.995	6.081	320.497	14.564	295.682	34.934	1.313	335.061	3.132	88,25	10,03	0,40

Tabel Capaian Rasio Desa Berlistriki 2017-2022

KAB	KEC.	KEL/ DESA	DESA BELUM BERLISTRIK						RATIO DESA BERLISTRIK (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pasangkayu	12	63	5	0	0	0	0	0	92,06	100,00	100,00	100	100	100
Mateng	5	54	6	0	0	0	0	0	89,29	100,00	100,00	100	100	100
Mamuju	11	101	16	12	12	15	15	14	84,16	88,12	88,12	85,1	85,15	86,13
Majene	8	82	5	4	0	0	0	0	93,90	95,12	100,00	100	100	100
Mamasa	17	181	94	36	24	25	21	16	48,07	80,11	86,74	86,2	88,40	91,16
Polman	16	167	7	3	0	0	0	0	95,81	98,20	100,00	100	100	100
JUMLAH	69	648	133	55	36	40	36	30	79,54	91,54	94,46	93,8	94,46	95,37

Sumber : Dinas ESDM 2023

### 3. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni, indikator ini diukur dengan melihat jumlah rumah layak huni per jumlah keseluruhan rumah x 100. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat jumlah seluruh rumah yang ada 322,312 unit dengan kondisi layak 174,092 sehingga realisasi kinerja indikator ini adalah 54,01%, dibandingkan dengan target maka persentase capaiannya adalah 55,68. berikut disajikan data perbandingan capaian kinerja per target periode RPJMD 2017-2022:

Tabel perbandingan persentase capaian kinerja indikator

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2018	90,12	88,52	98,22
2019	90	91,66	101
2020	93	94,61	101
2021	95	96,55	101
2022	97	54,01	55,68

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :
1. Penyelarasan seluruh dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan Program kegiatan tepat sesuai dengan outcome sasaran;
  2. Keberhasilan pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat daerah pengampu sasaran strategis pemda;
  3. Memaksimalkan pelaksanaan program pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
  4. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan pada tahun 2022 adalah masyarakat miskin dapat menikmati listrik PLN sebanyak 455 RTS yang sumber pembiayaan berasal dari APBD tahun 2022 yang tersebar di 6 Kabupaten yaitu :
    1. Kabupaten Mamaju sebanyak 40 RTS



2. Kabupaten Majene sebanyak 90 RTS
  3. Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 135 RTS
  4. Kabupaten Mamasa sebanyak 100 RTS
  5. Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 40 RTS
  6. Kabupaten Pasangkayu sebanyak 50 RTS
- Faktor Penghambat keberhasilan
1. Pelaksanaan Penyelarasan dan peningkatan Kualitas dokumen perencanaan belum maksimal sehingga ada program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah pengampu sasaran startegis Pemda belum sesuai;
  2. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat daerah masih ada yang tidak sesuai dengan sasaran outcomenya;
  3. Prinsip money follows program dalam penggaran atau anggaran berbasis kinerja belum maksimal dilaksanakan;
  4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang masing masing
- Strategi Pemecahan Masalah
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada setiap bidang.
  2. Melaksanakan penjenjangan kinerja dari level atas sampai pada level staf sehingga outcome sasaran bisa tercapai.
  3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan fokus pada penyelenggraan Reformasi Birokrasi.
  4. Peningkatan elektrifikasi rumah tangga miskin
  5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
  6. Peningkatan kondisi infrastruktur pulau-pulau kecil dan desa tertinggal

Sasaran Strategis

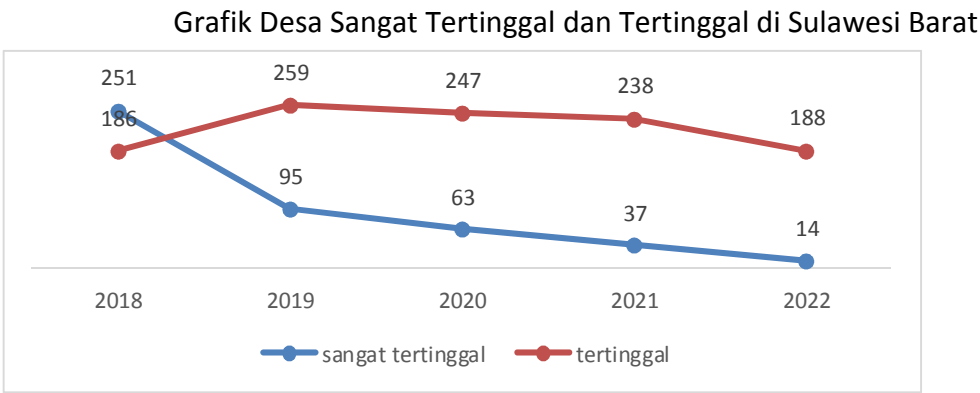
4

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yaitu **Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis** dan juga untuk mencapai tujuan **Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong produktivitas wilayah dan konektivitas antar wilayah** sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja. Capaian kinerja sasaran sebesar 82,90 dengan kategori predikat Sangat Baik Berikut hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya konektivitas antara wilayah pulau kecil dengan daratan utama dan antara desa dengan kota dalam mengurangi disparitas wilayah :

Tabel .... Pengukuran Kinerja Sasaran 4

Sasaran 4 : Meningkatnya konektivitas antara wilayah pulau kecil dengan daratan utama dan antara desa dengan kota dalam mengurangi disparitas wilayah					
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%Capaian	Interpretasi
5.1	Persentase Daerah Tertinggal (%)	30	35,13	82,90	Sangat Baik

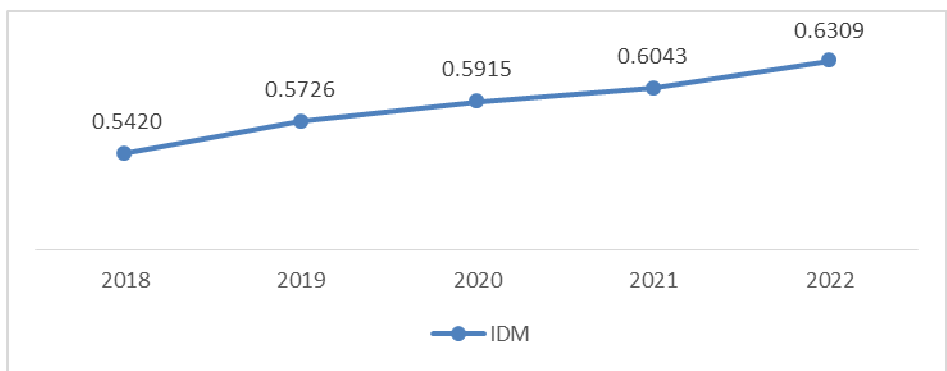
Status untuk Desa Tertinggal/sangat tertinggal semakin menurun dari tahun ke tahun pada awa masa RPJMD 2017-2022 jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 437 desa dan diakhir periode tahun 2022 menjadi 202 desa dari 575 desa sehingga realisasi indikator ini sebesar 35,13%, Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir masa RPJMD maka Persentase capaian 82,90%. Berikut grafik Perkembangan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal serta tabel Perkembangan IDM :



Berikut data persentase capaian sesuai dengan target kinerja selama periode RPJMD 2017-2022:

Tabel perbandingan persentase capaian kinerja indikator			
Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2018	72	76	94,44
2019	61	61,57	99,06
2020	54	53,91	99,83
2021	46	47,83	96,02
2022	30	35,13	82,90

Grafik Perkembangan Status Desa Menurut IDMTahun 2022



- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
1. Penyelarasan seluruh dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan Program kegiatan tepat sesuai dengan outcome sasaran;
  2. Keberhasilan pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan pada Organisasi Perangkat daerah pengampu sasaran strategis pemda;
  3. Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi di sektor industri;
  4. Pemanfaatan teknologi dan inovasi.
  5. Diversifikasi produk.
  6. Peningkatan produksi dan produktivitas.
  7. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian.
  8. Peningkatan Sarana Prasarana.
  9. Pengembangan destinasi wisata melalui Perbaikan 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi).
  10. Peningkatan Ekonomi Kreatif.
  11. Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
  12. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan
  13. Penguatan Vokasi
  14. Peningkatan Kompetensi.
  15. Kerjasama dunia usaha dan peningkatan kewirausahaan.
  16. Pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan UMKM dan Koperasi.
  17. Perbaikan Iklim Usaha yang kondusif.
  18. Peningkatan promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan peluang investasi;
  19. Peningkatan kemudahan pelayanan perizinan investasi satu pintu;
  20. Optimalisasi BUMD;

- Faktor Penghambat keberhasilan
  1. Pelaksanaan Penyelarasan dan peningkatan Kualitas dokumen perencanaan belum maksimal sehingga ada program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah pengampu sasaran startegis Pemda belum sesuai;
  2. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat daerah masih ada yang tidak sesuai dengan sasaran outcomenya;
  3. Prinsip money follows program dalam penggaran atau anggaran berbasis kinerja belum maksimal dilaksanakan;
  4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal pada bidang masing masing;
- Strategi Pemecahan Masalah
  1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada setiap bidang;
  2. Melaksanakan penjenjangan kinerja dari level atas sampai pada level staf sehingga outcome sasaran bisa tercapai.
  3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan fokus pada penyelenggraan Reformasi Birokrasi;
  4. Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan;
  5. Meningkatkan nilai tambah pertanian;
  6. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif;
  7. Meningkatkan iklim investasi;
  8. Pengurangan kemiskinan dengan memperkuat pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran serta pemberdayaan dan peningkatan keterampilan masyarakat miskin;
  9. Meningkatkan peran pemerintah daerah daam memfasilitasi kerjasama desa;
  10. Meningkatkan partisipasi masyarakat daam pembangunan desa;
  11. Meningkatkan standar pelayanan minimal desa;
  12. Meningkatkan evauasi perkembangan desa dan kelautan;

Sasaran Strategis

5

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yaitu **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi** dan juga untuk mencapai tujuan **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan daya saing berbasis ekonomi lokal** sasaran ini diukur dengan Empat indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 72,71 % dengan kategori predikat **Baik** Berikut hasil pengukuran kinerja sasaran Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas :

**Tabel Pengukuran Kinerja sasaran 5**

Sasaran 5 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas					
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
6.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,63	2,30	30	Kurang
6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,23	2,34	95,07	Memuaskan
6.3	Angka Kemiskinan (%)	9,06	11,92	68,43	Baik
6.4	Indeks Gini Ratio	0,378	0,371	97,35	Memuaskan
Rata-rata				72,71	Baik

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 sebesar 2,30 dibandingkan dengan target 7,63 maka persentase capaian indikator ini 30 %, tingginya target yang tercantum dalam dokumen RPJMD sehingga persentase capaian sangat rendah. Perekonomian Sulawesi Barat tahun 2022 yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 54,07 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 33,65 triliun rupiah.

Ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 (C-to-C). Adapun pertumbuhan C-to-C tertinggi menurut lapangan usaha Penyediaan akomodasi 11,91%, transportasi dan pergudangan 8,37% dan jasa kesehatan & kegiatan sosial 8,26%. Secara Q-to-Q ekonomi Sulawesi Barat tumbuh 1,29%, pertumbuhan Q-to-Q tertinggi pada Pertambangan&Penggalian 21,75% disusul oleh Jasa konstruksi 18,65% seanjutnya Penyediaan akomodasi& mamin 6,71%.

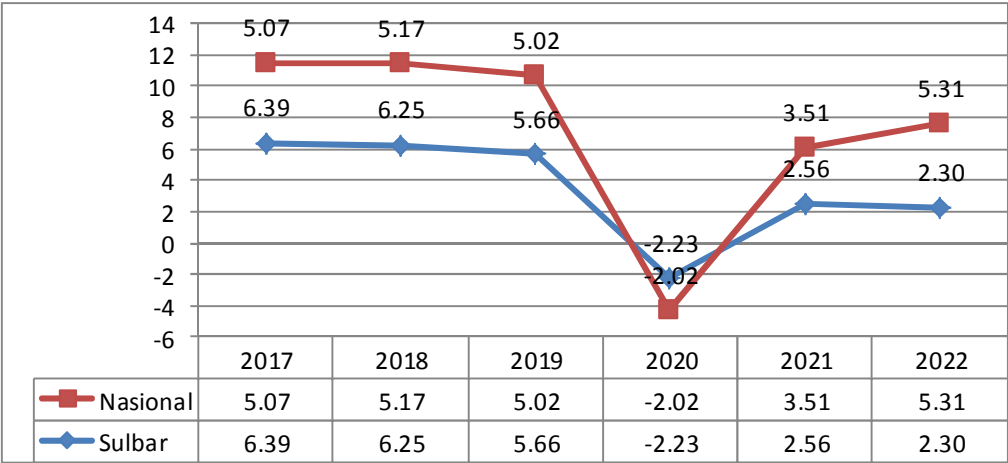
Pada skala regional di Kawasan Sulawesi Maluku Papua, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 terjadi di Maluku Utara yang mampu mencapai pertumbuhan sebesar 22,94 persen, disusul oleh Sulawesi Tengah yang mencapai pertumbuhan 15,17 persen. Adapun Sulawesi Barat hanya mampu tumbuh sebesar 2,30 persen, menempati posisi sembilan dari sepuluh provinsi. Berikut Perbandingan Persentase capaian kinerja dengan target masing-masing selama periode RPJMD 2017-2022:

Tabel perbandingan persentase capaian kinerja indikator

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2018	6,23	6,25	100,32
2019	6,23	5,66	90,85
2020	6,61	2,23	33,73
2021	7,09	2,56	36,10
2022	7,63	2,30	30,14

Masa pandemi Covic 19 dan bencana gempa bumi tahun tahun 2021 sangat berpengaruh dalam realisasi indikator ini dan target yang sangat tinggi pada dokumen perencanaan mengakibatkan % capaian sangat rendah.

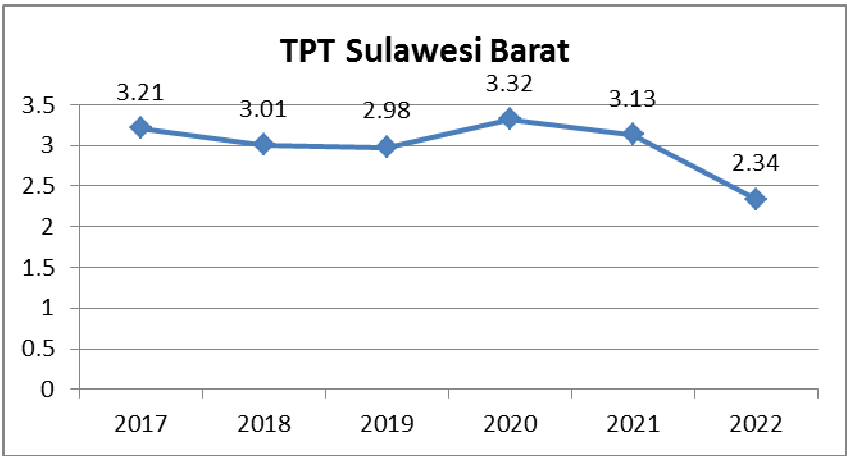
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2018–2022



2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Barat pada bulan agustus 2022 sebesar 2,34 persen, artinya dari sekitar 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja sekitar 2 orang diantaranya adalah pengangguran. Angka ini turun jika dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2021 dimana pada saat itu TPT-nya sebesar 3,13 persen.

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor konstruksi sedangkan yang mengalami penurunan terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Selama periode Februari 2018 sampai Agustus 2022, terjadi kenaikan TPT pada Agustus 2020 dan TPT **terendah** terjadi pada **Agustus 2022**, Berikut disajikan grafik perkembangan TPT 2017-2022 :



Sumber : BPS Sulbar 2023

Perbandingan Persentase capaian kinerja dengan target masing-masing selama periode RPJMD 2017-2022 sebagai berikut :

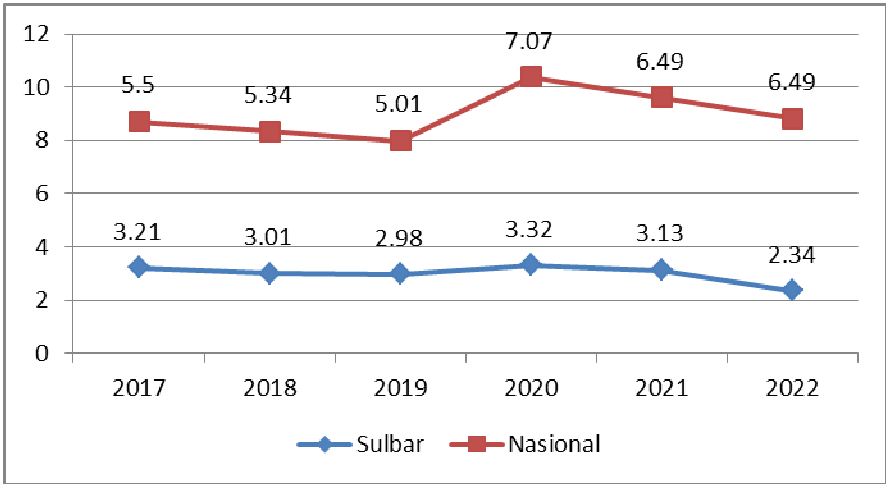
Tabel .... perbandingan persentase capaian kinerja indikator

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
-------	--------	-----------	-----------

2018	3,16	3,01	90,50
2019	2,77	2,98	92,41
2020	2,58	3,32	71,31
2021	2,41	3,13	76,99
2022	2,23	2,34	95,07

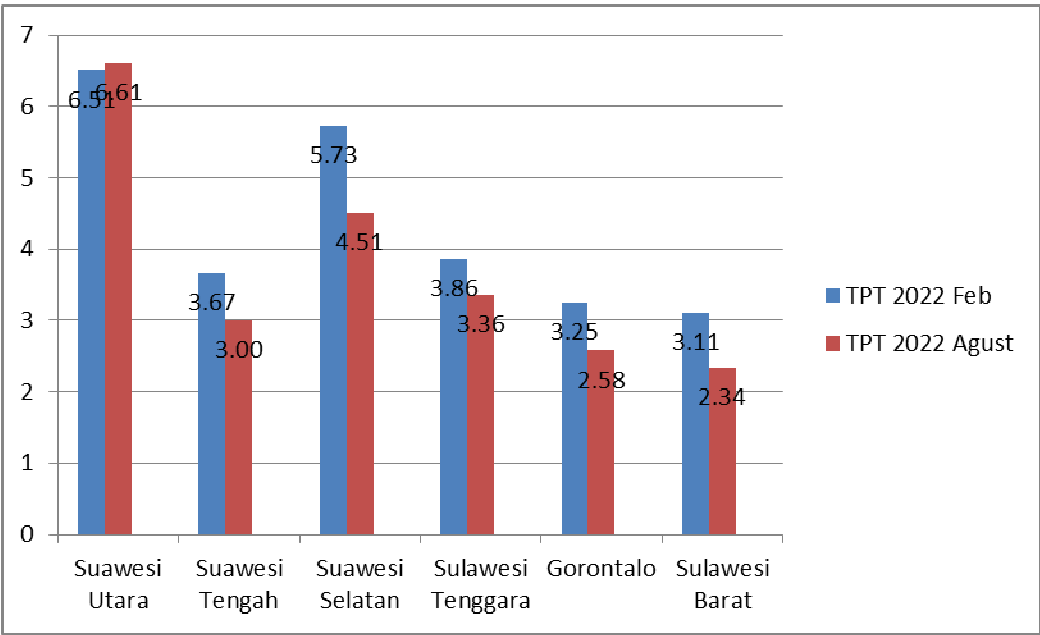
Selanjutnya kami sajikan data perbandingan dengan TPT Nasional :

**Grafik**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**



Sumber BPS 2023

Berikut perbandingan dengan provinsi di pulau Sulawesi :

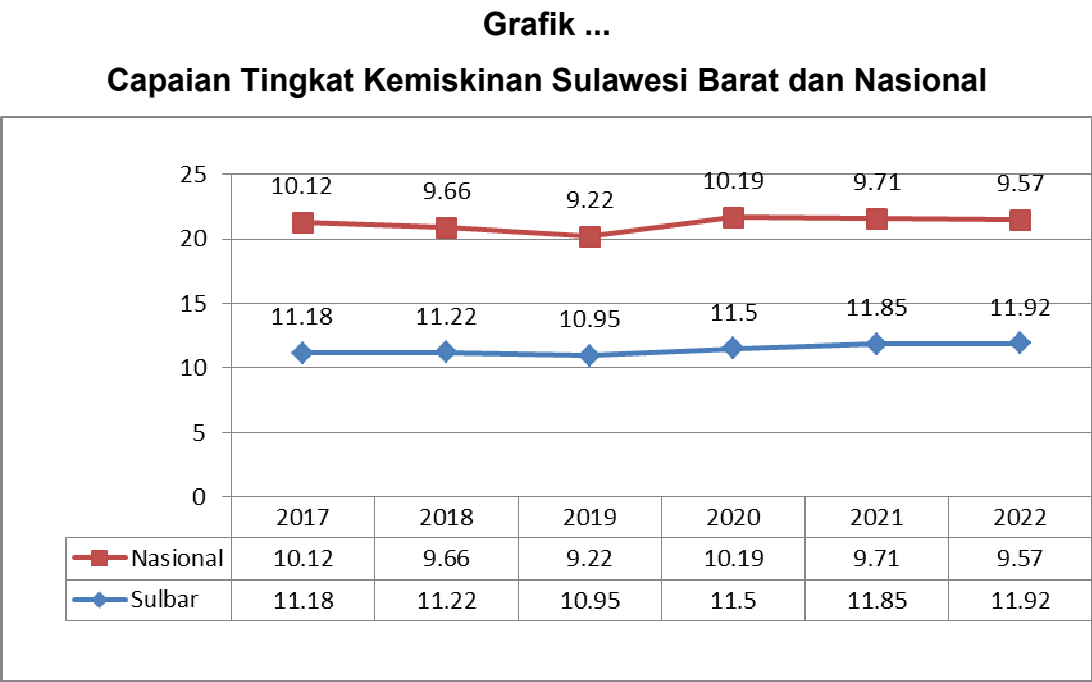


### 3. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Sulawesi Barat tahun 2022 (Per September) mencapai 11,92% atau sebanyak 169,26 ribu jiwa. Selama periode Maret 2018 sampai September 2022, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin September 2020, September 2021,

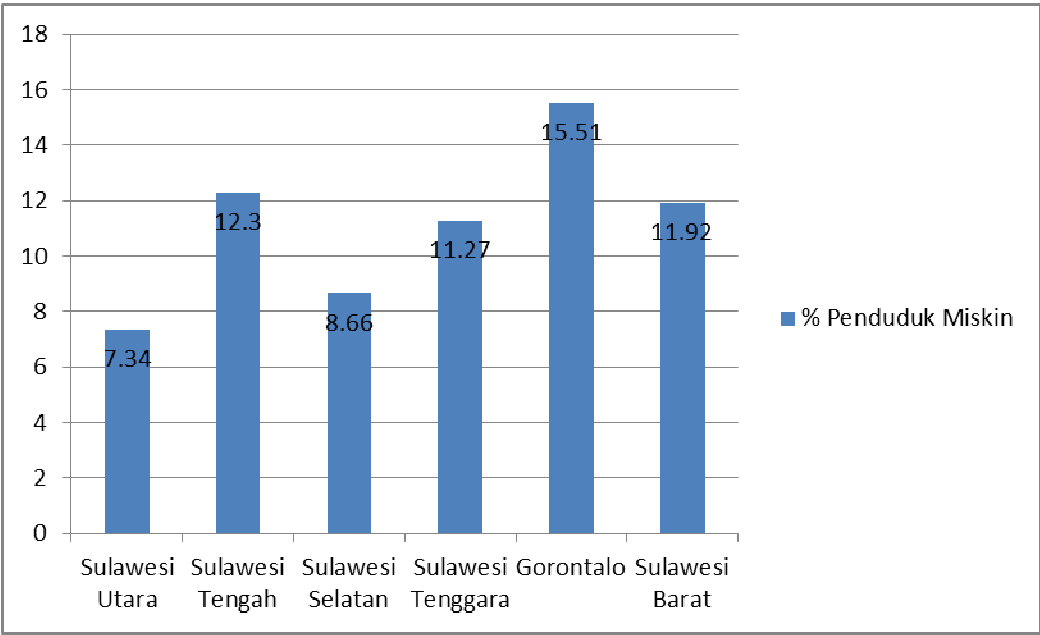
dan September 2022, Jumlah penduduk miskin **terendah** terjadi pada **Maret 2019**, sedangkan persentase penduduk miskin terendah pada **Maret 2020**.

Berikut data perbandingan capaian Angka kemiskinan (%) Sulawesi Barat dan Nasional per september :



Sumber : BPS 2023

Adapun perbandingan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi yang ada di Sulawesi sebagai berikut :



4. Indeks Gini Ratio

Gini ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan, nilai gini ratio berkisar antara 0-1, semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, Nilai gini ratio Sulawesi Barat selama



maret 2018 sampai september 2022 cenderung berfluktuasi. Berikut tabel capaian indikator gini rasio :

Tabel ..... Capaian Gini Rasio

Provinsi Sulawesi Barat	Gini Rasio							
	2019		2020		2021		2022	
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept
Perkotaan	0,445	0,438	0,436	0,437	0,446	0,451	0,448	0,472
Perdesaan	0,317	0,320	0,321	0,321	0,321	0,326	0,322	0,315
<b>Sulbar</b>	<b>0,365</b>	<b>0,365</b>	<b>0,364</b>	<b>0,356</b>	<b>0,356</b>	<b>0,366</b>	<b>0,362</b>	<b>0,317</b>

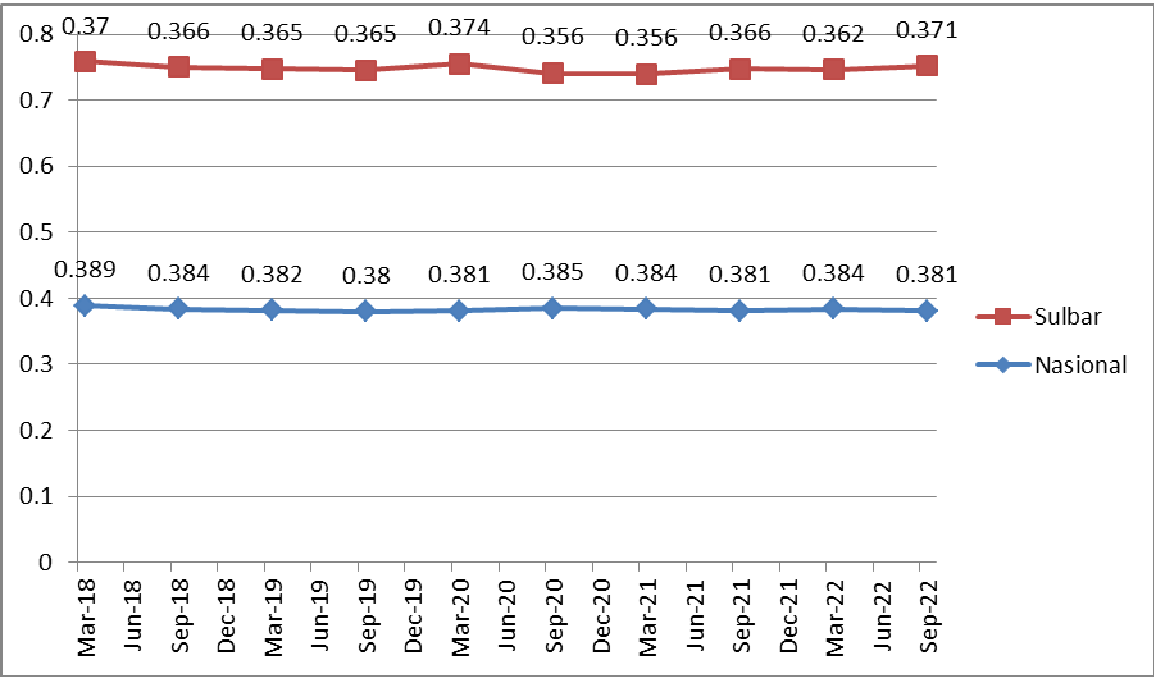
Sumber BPS Sulbar 2023

Perbandingan Persentase capaian kinerja dengan target masing-masing selama periode RPJMD 2017-2022:

Tabel .... perbandingan persentase capaian kinerja indikator IPM

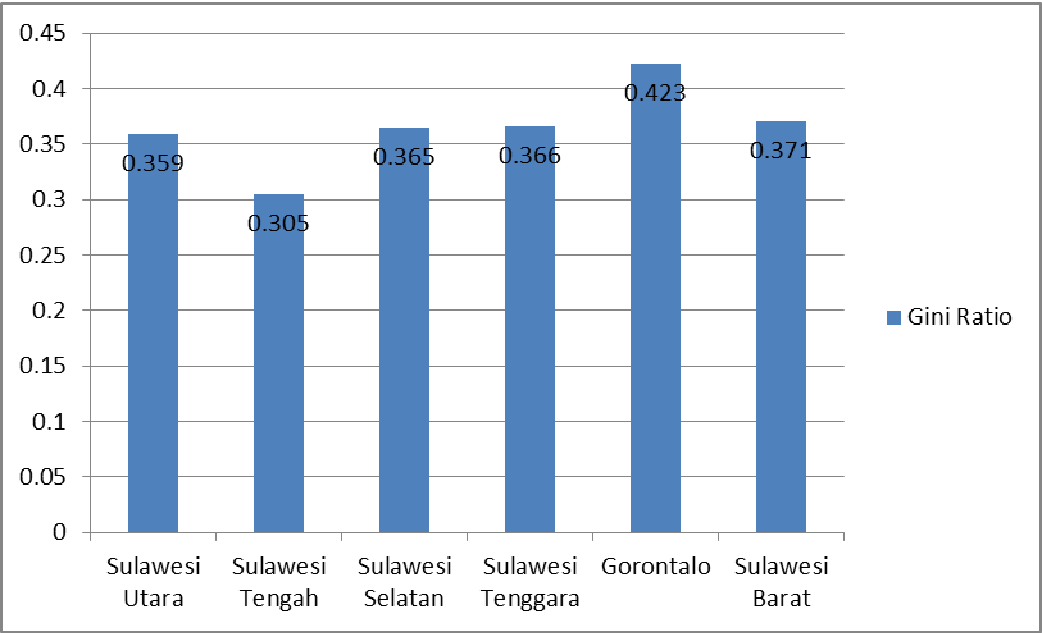
Tahun	Target	Realisasi Sept	% Capaian
2019	0,369	0,365	98,91
2020	0,370	0,356	96,21
2021	0,371	0,366	98,65
2022	0,378	0,317	83,86

Berikut Perbandingan capaian dengan Nasional :



Sumber BPS Sulbar 2023

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi yang ada di Sulawesi :



- Faktor faktor yang Mempengaruhi indikator kinerja sasaran ini adalah :
1. Produksi padi pada Triwulan I 2022 (Januari-Maret 2022) sebesar 106,41 ribu ton, meningkat 18,92 persen jika dibandingkan produksi padi pada Triwulan III 2021 (Juli-September 2021) yang hanya sebesar 89,48 ribu ton.
  2. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2022 sebesar 129,93, meningkat 11,02 persen jika dibandingkan NTP September 2021 yang sebesar 124,79.

3. Tingkat Penghunian Kamar (TKP) hotel berbintang pada Maret 2022 sebesar 31,16 meningkat 4,99 persen jika dibandingkan September 2021.
  4. Ekonomi Sulawesi Barat pada periode Triwulan I 2022 tumbuh sebesar 0,98 persen (year on year) sedangkan PDRB pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,40 persen (year on year).
  5. Pada periode September 2021 - Maret 2022, secara umum di Sulawesi Barat mengalami inflasi sebesar 3,06 persen.
  6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2022 sebesar 3,11 persen, turun sebesar 0,02 persen poin jika dibandingkan TPT Agustus 2021 yang sebesar 3,13 persen.
  7. Produksi padi Sulawesi Barat pada periode September 2022 sebesar 19,22 ribu ton, turun sebesar 51,60 persen dibandingkan periode Maret 2022 yang sebesar 39,71 ribu ton. Demikian juga jika dilihat produksi padi selama triwulan III 2022 sebesar 85,42 ribu ton, turun sebesar 19,14 persen jika dibandingkan selama triwulan I 2022 yang sebesar 105,64 ribu ton.
  8. Nilai Tukar Petani (NTP) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani pada September 2022 sebesar 114,04, turun 12,23 persen jika dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 129,93.
  9. Pada periode Maret - September 2022, secara umum di Sulawesi Barat harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami peningkatan antara lain: telur ayam ras, minyak goreng, ikan cakalang, ikan layang, gula pasir, beras, dan susu kental manis.
  10. Pada 3 September 2022, telah terjadi kenaikan BBM, dari pertalite, solar bersubsidi hingga pertamax.
  11. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada September 2022 sebesar 29,68, turun 4,75 persen jika dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar 31,16. Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) akomodasi lainnya pada September 2022 sebesar 23,37, turun sebesar 1,60 persen jika dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar 23,75.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
1. Penyelarasan seluruh dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan Program kegiatan tepat sesuai dengan outcome sasaran;
  2. Keberhasilan pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan pada Organisasi Perangkat daerah pengampu sasaran strategis pemda;
  3. Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi di sektor industri;
  4. Pemanfaatan teknologi dan inovasi.
  5. Diversifikasi produk.
  6. Peningkatan produksi dan produktivitas.

7. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian.
8. Peningkatan Sarana Prasarana.
9. Pengembangan destinasi wisata melalui Perbaikan 3A (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi).
10. Peningkatan Ekonomi Kreatif.
11. Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
12. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan
13. Penguatan Vokasi
14. Peningkatan Kompetensi.
15. Kerjasama dunia usaha dan peningkatan kewirausahaan.
16. Pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan UMKM dan Koperasi.
17. Perbaikan Iklim Usaha yang kondusif.
18. Peningkatan promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan peluang investasi;
19. Peningkatan kemudahan pelayanan perizinan investasi satu pintu;
20. Optimalisasi BUMD;

➤ Faktor Penghambat keberhasilan

1. Pelaksanaan Penyelarasan dan peningkatan Kualitas dokumen perencanaan belum maksimal sehingga ada program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah pengampu sasaran strategis Pemda belum sesuai;
2. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat daerah masih ada yang tidak sesuai dengan sasaran outcomenya;
3. Prinsip money follows program dalam penggaran atau anggaran berbasis kinerja belum maksimal dilaksanakan;
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal pada bidang masing masing;

➤ Strategi Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada setiap bidang;
2. Melaksanakan penjenjangan kinerja dari level atas sampai pada level staf sehingga outcome sasaran bisa tercapai.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan fokus pada penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
4. Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan;
5. Meningkatkan nilai tambah pertanian;
6. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif;
7. Meningkatkan iklim investasi;

- Pengurangan kemiskinan dengan memperkuat pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran serta pemberdayaan dan peningkatan keterampilan masyarakat miskin;
- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulbar dan semua stakeholder yang terkait diharapkan untuk mensinergikan Program kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian inflasi yang rendah dan stabil;
- Memicu aktivitas kegiatan perekonomian dengan melakukan stabilitas harga;
- Meningkatkan konektivitas dan efisiensi sistem logistik;
- Melakukan koordinasi kebijakan yang solid dan kuat antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral;
- Memaksimalkan sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perikanan;
- Melalui TPKAD baik Provinsi dan Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan terkait dapat bersinergi dalam membuka akses keuangan yang lebih besar kepada masyarakat terutama pelaku usaha di sektor potensial/unggulan.

Sasaran Strategis

6

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yaitu **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi** dan juga untuk mencapai tujuan **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan daya saing berbasis ekonomi lokal** sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja. Capaian kinerja sasaran sebesar 50 % dengan kategori predikat Kurang Berikut hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya daya saing ekonomi lokal :

Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 6

Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing ekonomi lokal					
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
7.1	Peringkat Daya Saing Daerah	18	27	50	Kurang

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional, Indikator ini mengukur Daya saing seluruh Provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel yaitu ACI-NUS yang merupakan lembaga penelitian Lee Kuan Yew Singapura dengan 4 unsur penilaian dan 81 indikator. Berdasarkan hasil penelitian ACI-NUS Provinsi Sulawesi Barat berada pada posisi 27 dari 34 Provinsi di Indonesia dan harus diakui bahwa capaian peringkat ini masih rendah dari yang ditargetkan. Adapun rincian hasil penilaian tersebut :

- Provinsi Sulawesi Barat mendapat score -0,745 dengan ranking 27 dari 34 Provinsi

2. Peringkat terkait Stabilitas Ekonomi Peringkat 22 dengan score -0,475.
  3. Peringkat terkait Pengaturan Pemerintah dan Kelembagaan Peringkat 21 score - 0196.
  4. Peringkat terkait kondisi keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Peringkat 30 score - 0,651
  5. Peringkat terkait Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur peringkat 30, score 1,132
- Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini adalah :
1. Penyelarasan seluruh dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan Program kegiatan tepat sesuai dengan outcome sasaran;
  2. Keberhasilan pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan pada Organisasi Perangkat daerah pengampu sasaran strategis pemda;
  3. Adanya peningkatan perbaikan daya saing provinsi dari sisi stabilitas ekonomi, pengaturan pemerintah dan kelembagaan, kondisi keuangan bisnis dan tenaga kerja serta kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur;
- Faktor Penghambat keberhasilan
1. Pelaksanaan Penyelarasan dan peningkatan Kualitas dokumen perencanaan belum maksimal sehingga ada program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah pengampu sasaran startegis Pemda belum sesuai;
  2. Prinsip money follows program dalam penganggaran atau anggaran berbasis kinerja belum maksimal dilaksanakan;
  3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang masing masing
- Strategi Pemecahan Masalah
1. Melaksanakan penjangjangan kinerja dari level atas sampai pada level staf sehingga outcome sasaran bisa tercapai.
  2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada setiap bidang.
  3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan fokus pada penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
  4. Mengembangkan sistem pelayanan informasi dan perizinan berbasis elektronik

### Sasaran Strategis

7

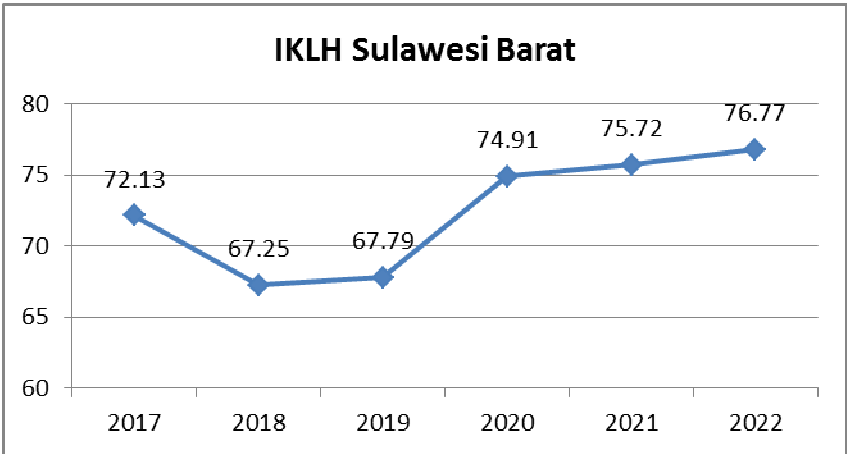
Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yaitu **Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan** dan juga untuk mencapai tujuan **Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumberdaya alam** sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja. Capaian kinerja sasaran sebesar 102,36 dengan kategori predikat Memuaskan Berikut hasil pengukuran kinerja sasaran Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup :

Pengukuran Kinerja Sasaran 7

Sasaran 7 : Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup					
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	76,77	102,36	Memuaskan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Barat pada tahun 2022 berada pada angka 76,77 berikut disajikan data perkembangan IKLH selama periode RPJMD 2017-2022 sebagai berikut :

Grafik Tren capaian IKLH Sulawesi Barat 2017-2022



Sumber : DLH Sulbar 2023

Persentase capaian kinerja indikator ini periode RPJMD 2017-2022 per target masing-masing sebagai berikut :

Tabel perbandingan persentase capaian kinerja indikator

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2018	67,25	67,25	100
2019	67,79	67,79	100
2020	72	74,91	104,04
2021	73	75,72	103,72
2022	75	76,77	102,36

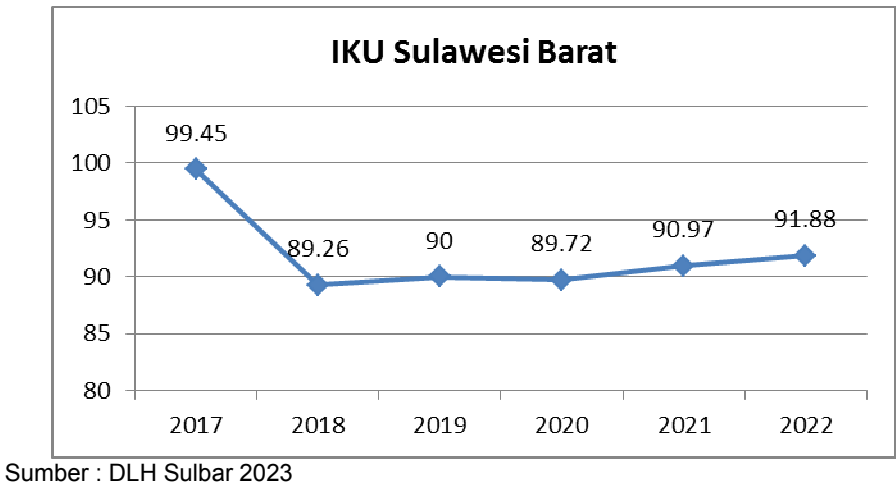
Peningkatan Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di sebabkan karena meningkatnya seluruh komponen pendukung IKLH.

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan di 6 ibukota kabupaten dengan menggunakan metoda passive sampler pada lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor. Sedangkan parameter yang diukur adalah SO2 dan NO2. Pengukuran kualitas udara yang dilakukan pada lokasi tersebut dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai

indeks dalam skala 0 – 100 untuk setiap ibukota provinsi. Pengukuran kualitas udara dilakukan pada 4 titik sampel setiap lokasi, yaitu pada wilayah yang mewakili transportasi, industri/agro industri, pemukiman dan perkantoran/komersial, Berikut capaian indikator ini:

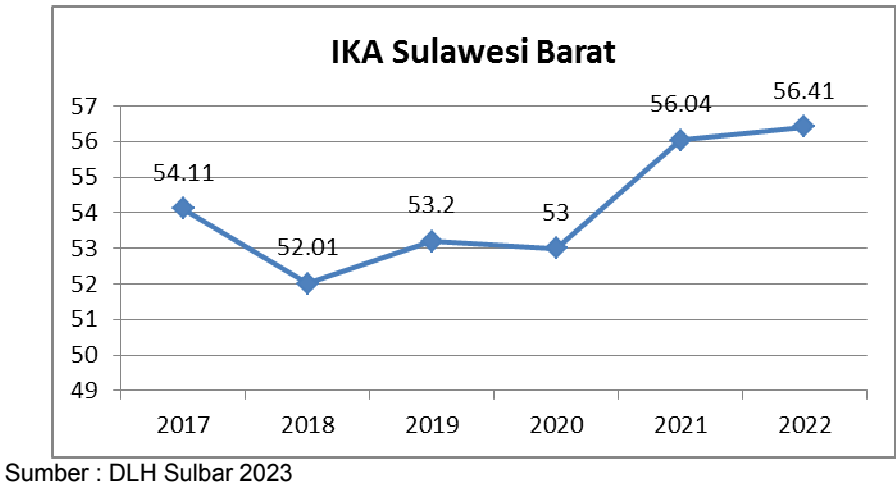
Grafik Tren capaian IKU 2017-2022



2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Pada Tahun 2022 terdapat 4 sungai yang di pantauyaitu Sungai Mapili, Sungai Karama, Sungai Budong-Budong dan Sungai Benggaulu, yang bekerjasama dengan Kementerian menggunakan dana Pusat. Data IndeksKualitas Air (IKA) diperoleh dari hasil pengujian terhadap 8 parameter kualitas air, yaitu: pH, DO, BOD, COD, TSS, NO3-N, T-Phospat, dan Fecal Coli. Hasil pemantauan dan perhitungan terhadap 4 sungai yang mewakili menunjukkan nilai indeks kualitas air pada tahun 2022 yaitu 56,41. Pada tahun 2022 capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 100%, dimana dari target IKA sebesar 55 – 75, hal ini disebabkan oleh penambahan data pemantauan sungai dari propinsi dan kabupaten dalam perhitungan IKA. Di tahun 2022 Provinsi Melakukan penambahan pemantauan sungai benggaulu dengan tiga titik sampling. Berikut grafik capaian indeks kualitas air :

Grafik Tren capaian IKA 2017-2022

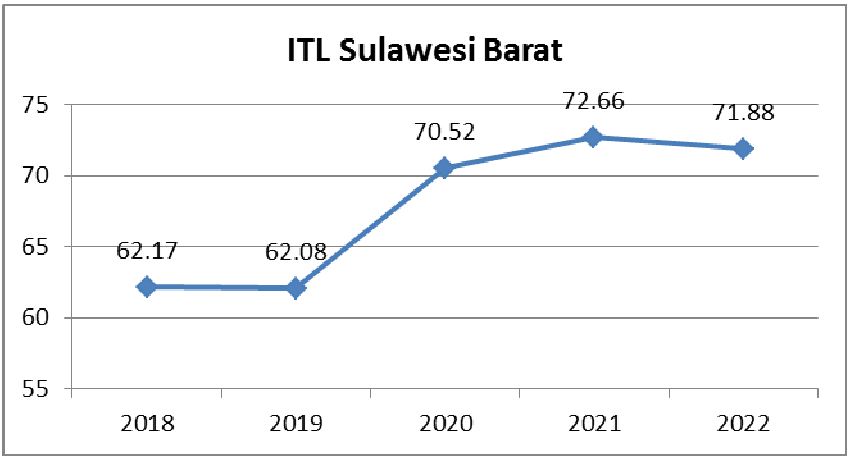


3. Indeks KualitasTutupan Lahan



Indeks Kualitas Tutupan lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan, data mengacu pada data yang ditetapkan oleh Kementrian LHK. Perhitungan indeks kualitas tutupan lahan dilakukan dengan melakukan analisa peta digitasi untuk menghitung luasan dari komponen indeks tutupan lahan.

**Grafik Tren capaian Indeks Tutupan Lahan 2017-2022**



Sumber : DLH Sulbar 2023

4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
- 1) Penyelarasan seluruh dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan Program kegiatan tepat sesuai dengan outcome sasaran;
  - 2) Keberhasilan pelaksanaan Program kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat daerah pengampu sasaran strategis pemda;
  - 3) Laboratorium lingkungan hidup provinsi Sulawesi Barat yang telah terakreditasi pada tahun 2020 dengan 11 parameter yang dapat dioptimalkan dalam pengambilan sampel udara, meskipun untuk parameter SO2 dan NO2 belum masuk ruang lingkup akreditasi akan tetapi personil pengambil sampel sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
5. Faktor Penghambat keberhasilan
- 1) Pelaksanaan Penyelarasan dan peningkatan Kualitas dokumen perencanaan belum maksimal sehingga ada program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah pengampu sasaran startegis Pemda belum sesuai;
  - 2) Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat daerah masih ada yang tidak sesuai dengan sasaran outcomenya;
  - 3) Prinsip money follows program dalam penggaran atau anggaran berbasis kinerja belum maksimal dilaksanakan;
  - 4) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang masing masing;
  - 5) Masih rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sungai;

- 6) Lemahnya koordinasi antara pemangku berbagai kepentingan (stakeholders) dalam menjalankan program pengendalian pencemaran secara terpadu;
  - 7) Keterbatasan anggaran sehingga dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai sehingga jumlah titik sampling yang diambil juga sangat terbatas
  - 8) Tidak adanya dukungan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga tanaman yang telah ditanam.
  - 9) Lemahnya koordinasi antara pemangku berbagai kepentingan (stakeholders) dalam menjalankan program pengendalian kerusakan khususnya pada daerah pesisir dan lahan kritis pada daerah yang menjadi sumber-sumber air.
  - 10) Masih rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan melakukan pembakaran.
  - 11) Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan khususnya di wilayah perkotaan yang merupakan salah satu alternative untuk mengurangi polusi udara.
  - 12) Masih banyaknya lahan yang perlu segera ditangani.
  - 13) Adanya penurunan indeks kualitas air yang salah satunya diakibatkan oleh tingginya kekeruhan akibat semakin rusaknya tutupan lahan di daerah hulu.
  - 14) Tingkat abrasi pantai yang semakin meluas sehingga perlu segera ditangani.
6. Strategi Pemecahan Masalah
- 1) Melaksanakan penjenjangan kinerja dari level atas sampai pada level staf sehingga outcome sasaran bisa tercapai.
  - 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada setiap bidang.
  - 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan fokus pada penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
  - 4) Peningkatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
  - 5) Peningkatan Pengelolaan Persampahan
  - 6) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - 7) Penanganan Gangguan Ekologis
  - 8) Optimalisasi Penanganan Lahan Kritis
  - 9) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Hutan
  - 10) Penanganan Degradasi Lingkungan pada Wilayah Pesisir
  - 11) Meningkatkan pelestarian fungsi kawasan hutan
  - 12) Meningkatkan akses pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan Masyarakat

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

Untuk mencapai kinerja target indicator sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, selain factor pendukung lain maka aspek keuangan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan dalam pencapaian kinerja indikator adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Adapun realiasi anggaran per Sasaran Kinerja tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran**

No	Sasaran	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia	Rp 474.758.900.229,-	Rp 443.058.748.180,-	93,32
2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan Yang Akuntabel dan modern	Rp 609.757.802.295,-	Rp 604.532.163.364,-	99,14
3	Meningkatnya kapasitas Infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta pemukiman dan perumahan	Rp 320.050.018.411,-	Rp 306.406.873.098,-	95,73
4	Meningkatnya konektivitas antara wilayah pulau kecil Dengan daratan utama dan antara desa dengan kota dalam mengurangi disparitas wilayah	Rp 20.873.793.050	Rp 19.145.586.989	91,72
5	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Rp 166.538.254.599,-	Rp 138.567.866.330,-	83,20
6	Meningkatnya daya saing ekonomi local	Rp 8.637.286.382,-	Rp 8.551.213.192,-	99,00
7	Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	Rp 33.410.125.130,-	Rp 30.225.730.236,-	90,46